

***BERRE' RI SULAWESI MANIANG: DARI PRODUKSI, PERDAGANGAN,
PELAYARAN, HINGGA PENYELUNDUPAN
BERAS (1946-1956)***

***BERRE' (RICE) IN THE SOUTH SULAWESI: FROM PRODUCTION,
TRADING, SHIPPING, TO RICE SMUGGLING (1946-1956)***

Adil Akbar

Program Pascasarjana UNM, Prodi IPS Konsentrasi Pendidikan Sejarah

Universitas Negeri Makassar, Kampus Gunung Sari, 90222

Telp (0411) 830366, Faksimile (0411) 855288

Pos-el: adilakbarilyasibrahimhusain@gmail.com

Handphone : 085298443202

ABSTRACT

Three primary objects of discussion are presented in this research: first, rice production in South Sulawesi during the years 1946-1950; second, the trade network and shipping of rice as a commodity in South Sulawesi during the years 1946-1950; third, the smuggling of rice in South Sulawesi during the years 1950-1956. The method employed in this research is a historical approach consisting of the following stages: data collection (especially in study of archives and records), critical, interpretation, and historiography (compiling the history). The results of this research demonstrate, first of all, a healthy level of production of rice in South Sulawesi, due to the quality and quantity of arable land suitable for rice planting; also, the presence of ports on both the east and west sides of the peninsula motivated the creation of rice trade network in East Indonesia during the years 1946-1950. Nevertheless, it is undeniable that the political upheaval that took place in South Sulawesi in the 1950s affected the production and trade of rice in the area, with one of the results being the emergence of rice smuggling. It may be generally concluded that in addition to contributing to the economy, the creation of a trade network also carries a political aspect.

Keywords: *South Sulawesi, rice, ports, smuggling, trade*

ABSTRAK

Terdapat tiga hal pokok yang dibahas dalam penelitian ini: *pertama*, Produksi Beras di Sulawesi Selatan kurun tahun 1946-1950; *kedua*, Jaringan Perdagangan dan Pelayaran Komoditas Beras di Sulawesi Selatan kurun tahun 1946-1950; *ketiga* Penyelundupan Beras di Sulawesi Selatan kurun tahun 1950-1956. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Sejarah dengan tahapan, Heuristik (pengumpulan data, terutama studi kearsipan dan kepustakaan) kritik, Interpretasi (penafsiran) dan histiografi (penulisan sejarah). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: hasil produksi beras di Sulawesi Selatan memuaskan. Hal ini dikarenakan potensi alam dan luasnya lahan produktif untuk ditanami padi, selain itu kehadiran pelabuhan – pelabuhan di pesisir barat dan timur Sulawesi Selatan mendorong terciptanya jejaring perdagangan beras di kawasan timur Indonesia pada kurun tahun 1946-1950. Walaupun demikian, tidak dapat dinafikan gejolak politik yang terjadi di Sulawesi Selatan kurun tahun 1950-an mempengaruhi produksi dan perdagangan beras di daerah tersebut, salah satunya ialah praktek-praktek penyulundupan beras. Secara umum dapat disimpulkan selain bernilai ekonomis, menciptakan jejaring ekonomi juga memiliki nilai politik.

Kata Kunci: *Sulawesi Selatan, beras, pelabuhan, penyelundupan, perdagangan.*

PENDAHULUAN

*“5.000 Ton Beras di Teluk Bintang Gagal
Diselundupkan”.*

Apa yang Anda baca di atas

merupakan *headline* atau tajuk utama rilis berita tempo.co, dalam rilis berita tersebut disebutkan bahwa Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Yudo

Margono melaksanakan inspeksi dan peninjauan ke kapal MV Alkar Trust dan MV Kar Turst yang berusaha menyelundupkan 5.000 ton beras di perairan Teluk Sebong Bintan. Lebih lanjut diceritakan bahwa dua kapal kargo asing tersebut tertangkap oleh tim gabungan *Western Fleet Quick Response* Lantamal IV Tanjung Pinang serta Lanal Batam pada hari Selasa, 8 Mei 2018 (*bisnis.tempo.co* diakses hari Selasa 05 Februari 2019).

Masih dalam laman yang sama, *tempo.co*—pada tajuk *Tiga Negara Tetangga Siap Serap Beras Bulog*—juga menguritakan mengenai rencana Perum Bulog untuk mengekspor beras—yang akan dilaksanakan pada kisaran pertengahan tahun 2019. Setidaknya tiga negara di kawasan ASEAN siap menyerap beras dari Perum Bulog tersebut (*bisnis.tempo.co* diakses hari Selasa 05 Februari 2019).

Tajuk berita pertama yang disebutkan sebelumnya memberikan gambaran upaya negara dalam melindungi komoditas beras dari praktik-praktik penyelundupan, selain itu memberikan gambaran bahwa beras memiliki satu nilai lebih sebagai suatu barang dagangan atau komoditas. Sederhananya, sebuah barang yang akan diselundupkan pastinya memiliki nilai yang tinggi di pasar selundupan (daerah tujuan selundupan). Agak berbeda ditemukan dalam tajuk ke dua; laporan bulog mengenai rencana pemerintah untuk mengekspor beras ke luar negeri memberikan gambaran bahwa produktifitas beras di Indonesia meningkat, walaupun sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah akan melaksanakan impor beras.

Dua peristiwa faktual yang telah disebutkan sebelumnya, yakni perihal penyelundupan beras dan ekspor beras sesungguhnya bukanlah hal yang baru di Indonesia, jika mereduksi pada ingatan masa lalu; perihal penyelundupan beras pernah terjadi dan terekam dalam catatan sejarah, sebagaimana yang tercatat dalam berita harian Kopal MKS dan kawat dari panglima Territorium VII Wirabuana; *mengenai berita penyelundupan beras di*

tahun 1954.

Disebutkan sebanyak 4.000 ton beras diselundupkan ke Kalimantan, terutama daerah-daerah yang berbatasan dengan Tawau Malaysia, dalam berita kawat tersebut menyatakan bahwa beras diselundupkan dari Sigeri (Baru) kemudian dimuat dengan perahu-perahu kecil ke Pulau Salemo dan pulau-pulau sekitarnya yang selanjutnya diangkut ke Kalimantan dengan menggunakan perahu layar bertonase besar (Arsip Barro, *No. Reg. 179*).

Senada dengan penyelundupan beras, ihwal ekspor beras pun juga terekam dalam catatan sejarah. Disebutkan pada tahun 1946 Indonesia sebagai suatu negara yang baru merdeka pernah mengekspor beras ke India—yang kala itu ditimpa bencana kelaparan. Pengiriman atau ekspor beras dari Indonesia ke India pada bulan April 1946 bukan hanya bertujuan untuk membantu bencana kelaparan yang dialami India, melainkan mengirim sebuah pesan bahwa Indonesia mampu menembus blokade ekonomi yang dijalankan oleh Belanda di masa-masa awal kemerdekaan. Diplomasi beras yang dilakukan Sjahrir sedikit banyak membantu pihak Republik Indonesia untuk mendapat bantuan pengakuan kedaulatan dari luar negeri dan memberikan pesan ke dunia luar untuk mengakui eksistensi kehadiran negara yang baru merdeka bernama : Indonesia.

Dua peristiwa yang memiliki kesamaan namun berbeda ruang dan waktu itu setidaknya memberikan gambaran bahwa komoditas beras memiliki andil tersendiri dalam jalannya satu narasi sejarah di Indonesia, dan tentunya menguatkan sebuah pernyataan bahwa sejarah itu tidak hanya berdimensi kelampauan, ilmu tersebut juga berdimensi kekinian dan yang akan datang.

Jika berbicara tentang beras, maka salah satu daerah yang menjadi perbincangan adalah Sulawesi Selatan. Daerah tersebut sejak dahulu dikenal sebagai daerah penghasil beras. Tercatat, kurun tahun 1946-1948 daerah Sulawesi Selatan telah memproduksi beras sebanyak

982,15 kuintal per hektar (qt/Ha) dengan luas areal persawahan di kurun tahun tersebut mencapai angka 372.864 hektar (Anonim, 1953 : 410).

Produksi beras yang melimpah di tahun tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk diperdagangkan, beberapa catatan menyebutkan bahwa sebanyak 1.000 – 5.000 ton beras—pada paruh awal abad ke-20—di kirim dari Pelabuhan Makassar ke wilayah Ambon, selain itu terdapat pula 2.000 ton beras dikirim ke Ternate (Asba, 2007) (Nur, 2003) (Najamuddin, 2000).

Setidaknya ihwal tersebut di atas dapat dibuktikan dengan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Makassar kurun tahun 1946-1949, tercatat sebanyak 1.118 kapal dengan beban tonase 9.394.620,23 kubik dan 2.652 perahu tradisional dengan total tonase 97.944,85 kubik hilir mudik di pelabuhan Makassar. Angka-angka tersebut setidaknya memberikan indikasi bahwa kegiatan perekonomian di sektor pelayaran menggeliat terutama kegiatan ekspor-impor komoditi perdagangan di mana salah satunya ialah beras (Najamuddin, 2000 : 128). Selain itu, kehadiran-kehadiran perusahaan asing dan lokal seperti Mandeers, Seeman & Co, Perusahaan Insulinde Makassar, Moreoux & Co, Coprafounds dan lain sebagainya turut membangkitkan gairah geliat ekonomi di Indonesia Timur terutama pengangkutan komoditi beras, kopra, kayu, melalui pelabuhan Makassar baik menggunakan jasa KPM maupun perahu tradisional milik masyarakat setempat (Evita, 2018).

Lebih lanjut, dalam catatan arsip koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan bahwa kurun tahun 1955-1956 terjadi transaksi perdagangan beras dari Sulawesi Selatan ke berbagai daerah seperti Kalimantan dan Ambon, sebagaimana nukilan berikut ini:

“Dengan segala hormat.

Bersama ini kami dari N.V. Batu-Putih pusat Makassar, menjampaikan bahwa : kini kami ada mempunyai persediaan beras di Pare-Pare sebanyak 100 (seratus) ton.

Dengan ini kami memohon dengan amat sangat, agar bapak suka membukakan kesempatan kepada kami untuk mengirimmja ke Kalimantan dengan perahu/kapal.

Kesempatan ini kami anggap sebagai suatu bannantuan jang bermutu tinggi terhadap kelantjaran/kemadjuan perusahaan kami.

Sebelumnja kami aturkan banjak terimakasih.-“ (Arsip Muhammad Saleh Lahade, No. Reg. 273 : Surat Keluar N.V. Batu Putih)

Informasi tersebut di atas memberikan pada kita suatu fakta bahwa; *Pertama* di tahun 1955-1956 daerah Pare-Pare setidaknya telah menghasilkan beras sebanyak seratus ton. *Kedua*, telah terjalin kontak perdagangan antara Sulawesi Selatan dengan Kalimantan. *Ketiga*, jaringan pelayaran dan perdagangan beras dikontrol langsung oleh militer. *Keempat*, perdagangan beras dilaksanakan melalui laut, di samping melalui darat.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa komoditi beras merupakan salah satu komoditi dagang yang seksi dan memiliki nilai penting, tidak hanya sebagai satu komoditi yang diperdagangkan dan dikonsumsi, bahkan komoditi beras pada fase tertentu menjelma menjadi alat tukar yang menopang logistik perang Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan kurun tahun 1950-1965.

Olehnya itu beras sebagai komoditas dagang dan beras sebagai bahan konsumsi utama masyarakat, telah menempatkan komoditas ini diperebutkan dan dicari oleh banyak orang. Dalam konteks inilah perlu diketahui bagaimana beras dikelola, diproduksi, dikembangkan dan dipasarkan. Melalui proses tersebut, maka komoditi beras dalam konteks ini menjadi menarik untuk dijelaskan dalam konteks historis.

METODE

Secara umum penelitian ilmiah terbagi menjadi dua bagian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Untuk penelitian ini menggunakan penelitian

kualitatif dengan pendekatan *analytic history* (analisis sejarah) yaitu penulisan sejarah yang memanfaatkan teori dan metodologi. Metodologi sejarah tersendiri terbagi atas *heuristik*, *kritik*, *interpretasi*, dan *historiografi*. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan sumber-sumber sejarah berupa sumber tertulis dari dokumen-dokumen sebagai sumber utama penulisan—dengan menekankan pada aspek kronologis sebuah peristiwa.

Langkah yang pertama dilakukan dalam menulis penelitian ini ialah: *Heuristik*. Heuristik secara sederhananya memiliki pengertian mengumpulkan sumber-sumber sejarah, mengumpulkan data-data sejarah (Sjamsuddin, 2007 : 86). Untuk mengumpulkan data-data tersebut setidaknya dapat dilakukan dengan dua cara; *pertama* studi arsip. *Kedua*, studi kepustakaan.

Pertama, studi arsip. Penelusuran arsip dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamatkan di: Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 12 Nomor 146, Tamalanrea, Kota Makassar. Arsip yang membantu dalam penelitian ini ialah : (1) Arsip pribadi Muhammad Saleh Lahade 1937-1973; (2) Arsip Pemda Barru; (3) Arsip Pemda Selayar.

Kedua. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari dan menemukan data-data berupa dokumen dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti karya ilmiah, buku, majalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Dalam studi kepustakaan ini, terdapat beberapa karya yang menjadi *entry point* atau pintu masuk dalam mengulas permasalahan produksi, perdagangan, pelayaran, hingga penyelundupan beras. Karya tersebut berupa penelitian ilmiah tingkat skripsi, tesis, dan disertasi. Seperti skripsi: Sitti Maryam, Muhammad Vibrant Anwar, Muhammad Rafiuddin. Kemudian Tesis dari Najamuddin, Rasyid Asba, dan Nahdia Nur serta disertasi dari Abdul Rasyid Ambo

Sakka. Selain itu terdapat beberapa makalah-makalah yang patut dijadikan acuan dalam menulis penelitian ini, semisal makalah-makalah yang termaktub dalam risalah prosiding IKAJIS I (Saransi dan Nur, 2018).

Langkah yang kedua ialah kritik. Kritik dalam metode sejarah terbagi atas dua, kritik interen dan eksteren. *Kritik intern* dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah, kemampuan sejarah meliputi kompetensi, kedekatan atau kehadiran sumber dalam peristiwa sejarah. Selain itu kepentingan dan subjektivitas sumber dan ketersediaan untuk mengungkapkan kebenaran. Konsistensi sumber terhadap isi atau sumber (Madjid dan Wahyudi 2004: 224). *Kritik ekstern* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebebasan dan autentifikasi sumber. Kritik terhadap autentitas sumber tersebut misalnya dengan melakukan pengecekan bahan berupa kertas atau tinta apakah cocok dengan di masa di mana bahan semacam itu biasa digunakan atau di produksi, memastikan suatu sumber apakah termasuk sumber asli atau salinan.

Langkah berikutnya adalah interpretasi, yakni menafsirkan data dan fakta sejarah kemudian disusun menjadi satu jalinan peristiwa yang kronologis. Setelah melalui tahapan sebelumnya, maka tahap berikutnya adalah: *Historiografi*. Historiografi dalam penulisan sejarah, wujud dari penulisan (historiografi) itu merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan (eksposisi) yang sampai kepada dan dibaca oleh para pembaca atau pemerhati sejarah (Sjamsuddin, 2007:236).

PEMBAHASAN

Produksi Beras Di Sulawesi Selatan Kurun Tahun 1946-1950

Dalam berbagai catatan disebutkan bahwa pada kisaran tahun 1906 penduduk yang bergiat di bidang pertanian berkisar pada angka 69,8 persen, kemudian di tahun

1930 meningkat menjadi 71,38 persen (Maryam, 1999 : 2). Lalu dikurun tahun 1947-1948 mencapai angka 85 persen atau 3.297.302 jiwa (Najamuddin, 2000 : 23) (Anonim, 1953 : 25).

Jika melihat angka di atas, menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah masyarakat yang terjun dalam dunia pertanian. Ihwal tersebut dapat

dihubungkan dengan luas areal persawahan di Sulawesi Selatan. Tercatat tahun 1938 luas areal persawahan di Sulawesi Selatan mencapai angka 334.581 hektar (Maryam, 1999 : 10) kemudian meningkat menjadi 346.879 hektar di kurun tahun 1943-1951 (Anonim, 1953 : 410). Agar lebih jelasnya, dapat disimak dari tabel-1.1 berikut ini:

Tabel 1.1: Luas Areal Sawah Pada Tahun 1938 di Sulawesi Selatan

<i>Afdeling</i>	<i>Onderafdeling</i>	Luas Sawah (Ha)
Makassar	Pangkajene	18.860
	Maros	20.554
	Gowa	24.148
	Jeneponto-Takalar	21.947
Bonthain	Bonthain	1.646
	Bulukumba	6.629
	Sinjai	7.635
	Seleier (Selayar)	-
Bone	Bone	40.000
	Soppeng	12.535
	Wajo	47.172
Pare-Pare	Barru	8.396
	Pare-Pare	4.176
	Pinrang	13.056
	Sidenreng-Rappang	31.635
	Enrekang	-
Mandar	Polewali	3.500
	Majene	200
	Mamuju	-
	Mamasa	6.000
Luwu	Makale-Rantepao	3.500
	Palopo	16.400
	Masamba	10.070
	Malili	-
	Kolaka	1.000
Kota Besar Makassar	Makassar	4.022
Total Keseluruhan	Sulawesi Selatan	334.581

Sumber: diolah dari Siti Maryam 1999. *Perdagangan Beras Di Sulawesi Selatan Tahun 1930-1940*. Skripsi. Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Hlm. 10

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa tahun 1938 luas areal persawahan di Sulawesi Selatan mencapai angka 334.581 Ha. Di mana *Afdeling* Bone—yang meliputi *Onderafdeling* Bone, Soppeng, Wajo—merupakan daerah penghasil beras terbesar, dengan luas sawah produksi 99.707 Ha. Sedangkan *Afdeling* Mandar yang terdiri dari *Onderafdeling* Polewali, Majene, Mamuju dan Mamasa hanya memiliki luas

areal sawah produksi 3.700 Ha. Adapun untuk Kota Besar Makassar memiliki lahan seluas 4.022 Ha yang ditanami padi.

Luasnya areal persawahan di Sulawesi Selatan dan adanya pembangunan irigasi secara besar-besaran diawal Abad XX berpengaruh langsung pada meningkatnya produksi beras di Sulawesi Selatan. Nilai ekspor beras Sulawesi Selatan pada tahun 1920 hanya berjumlah f.300.000 naik

menjadi f.3.300.000 pada tahun 1936 (Sakka, 2003). Meningkatnya produksi beras di Sulawesi Selatan tentunya juga berdampak pada meningkatnya perdagangan beras antar pulau. Produksi

beras di Sulawesi Selatan diperdagangkan ke hampir seluruh wilayah Hindia – Belanda, seperti yang diuraikan pada tabel-1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2: Ekspor Beras Sulawesi Selatan Ke Berbagai Pulau di Hindia Belanda Pada Tahun 1934-1935 (dalam Ribuan Ton)

Tahun	Bali/ Lombok	Jawa	Maluku	Manado	Kalimantan	Total
1934	16,44	58,19	12,28	12,24	154,98	289,03
1935	26,34	66,84	10,10	22,28	146,23	321,55

Sumber: Abdul Rasyid A. Sakka 2003. *Ekspansi dan Kontraksi Ekspor Kopra Makassar 1888-1958*. Disertasi. Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Hlm. 69

Secara umum menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah di Sulawesi Selatan adalah daerah penghasil beras, yang meliputi: *Afdeling* Makassar, Bonthain, Parepare, Mandar, Luwu, dan Kota Besar Makassar. Besarnya produksi beras tersebut dikarenakan bentang alam Sulawesi Selatan yang begitu baik dalam mendukung produktifitas pertanian.

Jika dilihat dalam peta atau atlas, Sulawesi pada masa akhir kolonial (1941) (lihat lampiran peta Ammarel, 2016) dengan jelas memperlihatkan wilayah yang terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi tersebut berupa pegunungan lipatan yang membentang dari selatan ke utara Sulawesi Selatan. Pegunungan lipatan tersebut membelah daerah ujung atas *Afdeling Bonthain* yang berbatasan dengan *Afdeling* Makassar (dalam hal ini *Onderafdeling/Swapraja* Gowa, wilayah yang dimaksud ialah *Ulu Ere* Bantaeng dengan batas Bontolempangan, Biringbulu, dan Kaki Gunung Bawakaraeng) kemudian naik ke atas membelah wilayah *Onderafdeling* Maros, *Afdeling* Bone (Batas Bone-Gowa), *Onderafdeling / Swapraja* Soppeng, *Onderafdeling / Swapraja* Wajo, *Onderafdeling / Swapraja* Sidenreng-Rappang, *Onderafdeling* Enrekang, hingga *Onderafdeling* Makale-Rantepao atau Toraja. Hal inilah yang memisahkan musim bagi wilayah pesisir pantai barat dan pesisir pantai timur, dan berakibat bagi iklim yang

terbagi menjadi musim barat dan musim timur. Secara umum kedua musim ini membawa hujan bagi wilayah Sulawesi Selatan.

Wilayah Sulawesi Selatan juga dialiri beberapa sungai-sungai yang cukup besar, bisa disebutkan di sini ialah Sungai Jeneberang di selatan Sulawesi Selatan yang membelah daratan Gowa. Sungai Walane yang membelah daratan Soppeng dan Wajo, Sungai Cenrana yang membelah Bone. Selain itu terdapat beberapa danau yang berada di Sulawesi Selatan, bisa disebutkan di sini ialah Danau Matano di Luwu, Danau Sidenreng di wilayah Sidenreng-Rappang, dan Danau Tempe di Wajo. Aliran sungai dan danau tersebut menjadi sumber pengairan untuk areal persawahan di Sulawesi Selatan (Mattulada, dkk., 1977 dalam Najamuddin, 2000 : 19). Selain itu, Sulawesi Selatan dikelilingi oleh laut pada tiga arah penjuruan mata angin. Sebelah barat daratan Sulawesi Selatan terhubung oleh Selat Makassar, di sebelah selatan daratan Sulawesi Selatan terhubung dengan Laut Flores, sedangkan daratan Sulawesi Selatan di penjuruan timur berhadapan langsung dengan Teluk Bone. Olehnya itu Sulawesi Selatan dapat dikatakan memiliki posisi maritim, sehingga terbuka kemungkinan bagi masyarakatnya yang tinggal di daerah pesisir untuk menjadi pelaut, nelayan, pelayar, dan nahkoda sebagai pilihan mata pencahariannya, mengarungi samudera dan

mengembara mencari nafkah di seberang laut.

Pada penjelasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa bagian tengah Sulawesi Selatan membentang daerah pegunungan lipatan dari selatan ke utara. Pegunungan lipatan tersebut membelah bentangan alam di daerah Bantaeng, Gowa, Maros, Bone, Soppeng, hingga ke Enrekang dan Tana Toraja serta Toraja Utara. Olehnya itu berpengaruh pada kondisi cuaca terutama permasalahan musim hujan. Ketika memasuki musim barat, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan yang meliputi Gowa, Makassar, Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare, mendapatkan guyuran hujan pada bulan Oktober, Nopember, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Daerah tersebut diguyur hujan dengan intensitas dari ringan hingga lebat. Daerah Pinrang agak ke utara—yang merupakan penghasil beras—mendapatkan hujan pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus dengan curah

hujan yang intensitasnya ringan hingga lebat. Sedangkan daerah penghasil beras lainnya, yakni Sidenreng-Rappang dan Wajo mendapat hujan pada bulan Apri, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember, Januari. Lalu ketika memasuki musim timur, daerah yang mndapat guyuran hujan ialah daerah sepanjang pesisir Teluk Bone, yakni meliputi Bulukumba, Sinjai, Bone, hingga Luwu. Daerah tersebut diguyur hujan pada bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan bulan Desember (Najamuddin, 2000 : 21).

Perbedaan curah hujan ini disebabkan oleh perbedaan ketinggian tanah dan struktur topografi, yaitu di bagian tengah Sulawesi Selatan melintang dari selatan ke utara suatu pegunungan dan hanya diputus oleh dataran rendah di wilayah Sidenreng Rappang dan Wajo. Olehnya itu, hampir sepanjang tahun produktifitas komoditas beras terus tumbuh dan berkembang. Untuk lebih jelasnya, dapat disimak dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3: Frekuensi dan Daerah Jatuhnya Hujan di Sulawesi Selatan serta Musim Tanam dan Musim Panen di Sulawesi Selatan Kurun Tahun 1946-1950

Musim Timur				Musim Barat			
Daerah	Jatuhnya Hujan di Bulan	Musim Tanam	Musim Panen	Daerah	Jatuhnya Hujan di Bulan	Musim Tanam	Musim Panen
Bulukumba Sinjai Bone Luwu	Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus	Januari/ Februari Maret / April	April/ Mei September/ Oktober	Gowa Makassar Maros Pangkep Barru Parepare	Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret	November/ Desember	April/ Mei/ Juni/ Juli
Soppeng Wajo Sidrap	April Mei Juni Juli Agustus Desember Januari			Pinrang dan daerah sebelah utara Pinrang	Desember Januari Februari April Mei Juni Juli Agustus		

Sumber: diolah dari *Memorie van Overgave den Controuler H.R. Rookmaaker. Betreffende de Onderafdeling Boni-Riattang, Afdeling Boni. Jaar 1915*. Hlm. 247-248; *Economische Breichten Oost Indonesie Jaar 1949*; *Economische Berichten Oost Indonesie Jaar 1950*; Arsip Pemda Bone Nomor Register 1520; Leon A. Mears. 1957. *Rice Marketing in The Republic of Indonesia*. Jakarta : The Institute for Economics and Social

Research and School of Economics University of Indonesia. Hlm 27: Najamuddin 2000. *Sulawesi Selatan: Pergumulan Antara Negara Federal dan Negara Kesatuan 1946-1949*, Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Hlm. 20-21; Nahdia Nur. 2003. *Produksi dan Pemasaran Beras di Sulawesi Selatan 1900-1943*. Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana UGM. Hlm. 70.

Sebelumnya, kurun tahun 1936-1937 produksi beras di Sulawesi Selatan mencapai angka kurang lebih 42.000 ton, kemudian menurun menjadi 40.500 ton di kisaran tahun 1937-1938. Lalu merangkak naik ke angka 60.000 ton pada kurun tahun

1938-1939. Dan di kurun tahun 1939-1940 berkisar di angka 71.000 ton. Tiga daerah penghasil beras yang melimpah kala itu adalah Parepare, Wajo, dan Soppeng. Selengkapnya dapat disimak dalam tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4: Perkembangan Produksi Beras dari Penghasil Beras di Sulawesi Selatan Kurun Tahun 1936-1940

Wilayah	1936-1937	1937-1938	1938-1939	1939-1940
Parepare	25.000 ton	27.000 ton	41.400 ton	46.000 ton
Wajo	10.000 ton	11.000 ton	11.000 ton	15.000 ton
Soppeng	4.500 ton	5.600 ton	5.600 ton	7.000 ton
Daerah Lain	2.500 ton	3.000 ton	2.000 ton	3.000 ton
Jumlah	42.000 ton	40.500 ton	60.000 ton	71.000 ton

Sumber : Nahdia Nur, Bambang Purwanto, dan Djoko Suryo, *Perdagangan dan Ekonomi di Sulawesi Selatan pada Tahun 1900-an sampai dengan 1930-an*. Jurnal Ilmu Budaya Vol. 4. No. 1. Edisi Juni, 2016. Hlm. 617

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel 1.3 yang memaparkan bahwa hampir sepanjang tahun di pesisir timur dan barat Sulawesi Selatan diguyur hujan dan memengaruhi pola tanam dan pola panen, maka tidak mengherankan jika Sulawesi Selatan di masa tersebut mampu

memproduksi beras dengan hasil yang melimpah, maka tidak salah jika predikat lumbung pangan nasional disematkan pada daerah Sulawesi Selatan. Agar lebih jelas ada baiknya menyimak tabel 1.5 berikut ini: tabel mengenai produksi beras di Sulawesi Selatan kurun tahun 1946-1948:

Tabel 1.5: Rata-Rata Penghasilan / Produksi Hasil Padi Kering Beberapa Daerah di Sulawesi Selatan Tahun 1946-1948

No	Afdeling		Luas Sawah (Ha)	Rata-rata penghasilan padi kering/gabah (qt/Ha)		
				1946	1947	1948
1	Gementee Makassar		111	16,64	6,96	23,72
2	Makassar	Gowa	23.742	23,74	24,51	29,23
		Maros	22.148	13,45	10,14	21,72
		Pangkajene	19.608	17,16	9,26	22,03
		Takalar	27.035	19,60	15,07	23,16
		Jeneponto	12.773	14,21	17,62	15,04
3	Bone	Bone	57.428	13,80	18,66	19,45
		Soppeng	20.554	22,52	20,75	23,26

		Wajo	54.920	17,35	21,58	21,08
4	Bonthain	Bonthain	2.917	32,30	23,64	24,68
		Bulukumba	10.000	29,97	31,03	25,56
		Sinjai	8.430	18,48	18,19	15,86
5	Pare-pare	Pare-pare	4.272	23,49	15,26	21,80
		Barru	9.217	24,54	22,81	28,00
		Pinrang	33.420	21,33	18,44	23,69
		Sidrap	40.034	19,80	21,47	20,10

Sumber: Anonim, 1953. Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi. Hlm. 410.

Jaringan Pelayaran Dan Perdagangan Beras Kurun Tahun 1946-1950

Munculnya jejaring perdagangan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kehadiran pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir barat dan pesisir timur Sulawesi Selatan. Berkembangnya pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat dilacak ketika para pedagang-pedagang pribumi Nusantara di abad-16 mengalihkan perdagangannya ke Timur Nusantara. Musabab dari perkara itu dikarenakan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, para saudagar kala itu menjadikan pelabuhan di Sulawesi Selatan, dalam hal ini Somba Opu sebagai pelabuhan transito, pelabuhan singgah sebelum ke Maluku (Umar, 1990) (Anwar, 1996) (Paeni, 1995 : 44 dalam Rafiuddin, 2011 : 36).

Uniknya, pola perdagangan Makassar memiliki karakteristik tersendiri, wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya tidak menghasilkan produk ekspor, kecuali tumbuhan padi atau beras, yang menurut berbagai sumber dikatakan sebagai beras dengan kualitas baik serta murah. Beras tersebutlah yang dimanfaatkan para pedagang dan pelaut sebagai perbekalan untuk melanjutkan perjalanan. Di satu sisi, menjadikan Makassar dan Sulawesi Selatan sebagai satu mata rantai jejaring perdagangan (Poelinggomang, 2011 : 50).

Terciptanya jejaring perdagangan komoditas beras tidak dapat dinafikan karena pada masa tersebut, yakni kisaran abad ke-16 dan abad ke-17 telah muncul

dan berkembang kota-kota pelabuhan di pesisir Sulawesi Selatan, mulai dari Makassar dengan Pelabuhan Somba Opu nya, Parepare dengan bandar niaganya, Bone dengan Pelabuhan Pallime dan Pelabuhan Bajoe. Pelabuhan-pelabuhan tersebut telah mendorong dan merangsang masyarakat untuk turun ke laut guna melakukan aktifitas pelayaran dan perdagangan. (Ahmad dan Kila, 2015) (Nur, 2017).

Memasuki abad ke-18, abad ke-19, hingga abad ke-20 kegiatan perdagangan semakin semarak dengan hilir mudiknya kapal-kapal laut yang melego jangkar di Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Pallime, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya telah turut andil menguatkan perekonomian Sulawesi Selatan. Salah satu komoditas yang kerak kali dijumpai dalam aktifitas perdagangan tersebut ialah beras.

Para pedagang tersebut, baik dari Bugis, Makassar, Selayar, Mandar, Melayu, dan bahkan dari luar—seperti Portugis—telah menjadikan Makassar dan Sulawesi Selatan sebagai pelabuhan serta pasar produksi. Lebih lanjut, di Pelabuhan Makassar sendiri, kurun tahun 1946-1949 telah tercatat sebanyak 1.118 kapal dengan beban tonase 9.394.620,23 melakukan aktifitas bongkar-muat dengan mengangkut berbagai komoditas yang laku di pasaran kala itu, seperti kopra dan beras. Selain kapal-kapal bertonase berat, juga sebanyak 2.652 perahu tradisional dengan total tonase 97.944,85 kubik keluar masuk di Pelabuhan Makassar. Angka-angka tersebut

memberikan indikasi bahwa kegiatan perekonomian di sektor pelayaran menggeliat terutama kegiatan ekspor-impor komoditas perdagangan di mana salah satunya ialah beras (Najamuddin, 2000 : 128) (Nur, 2003) (Asba, 2007) (Nur, Purwanto, & Suryo, 2016). Daerah yang cukup ramai ini telah membentuk pola-pola perdagangan yang berhubungan dengan daerah-daerah lainnya di kepulauan maupun di luar Indonesia / Nusantara.

Kehadiran pelabuhan di Makassar—baik langsung maupun tidak langsung—telah merangsang kegiatan produksi beras di daerah pedalaman dalam hal ini daerah penghasil beras di wilayah selatan Sulawesi Selatan yang meliputi *Afdeling Bonthain* dan *Afdeling* Makassar. Demikian pula dengan Pelabuhan Parepare—baik langsung maupun tidak langsung—telah merangsang kegiatan produksi beras di wilayah *Afdeling* Parepare yang meliputi: *Onderafdeling* Parepare, Barru, Pinrang, Sidenreng-Rappang, dan Enrekang. Daerah-daerah tersebut—minus Enrekang—telah lama dikenal sebagai daerah penghasil beras di bagian tengah-utara Sulawesi Selatan. Tidak hanya Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Parepare, di pesisir timur Sulawesi Selatan, geliat ekonomi perberasan juga nampak begitu nyata terutama di *Afdeling* Bone—yang meliputi *Onderafdeling* Bone, Wajo, dan Soppeng—melalui kegiatan bongkar muat komoditas beras di Pelabuhan Bajoe dan Pallime (Ahmad & Kila, 2015 : 3)

Selain karena banyaknya pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan, terciptanya jejaring perdagangan tersebut lebih dikarenakan para saudagar dan nahkoda (pelaut) memanfaatkan hembusan angin muson seperti angin muson barat laut, angin muson tenggara, angin muson timur laut, dan angin muson utara serta angin muson tenggara. Kiranya demikian maklum mengingat kala itu kapal-kapal yang bertonase ringan dan berat memanfaatkan hembusan angin sebagai tenaga penggerak kapal (Poelinggomang, 2016 : 14-16).

Secara umum, angin muson barat laut biasanya dimanfaatkan oleh pedagang yang berasal dari barat, seperti: Malaka, Riau, Johor, dan Batavia (Jakarta). Para pedagang dari daerah tersebut memanfaatkan hembusan angin muson barat laut untuk mengarahkan layar dan haluan kapal ke arah timur, tepatnya ke Makassar dan selanjutnya ke Maluku. Setelah kapal-kapal dari lokasi-lokasi tersebut (Malaka, Riau, Johor, dan Jakarta/Batavia) lego jangkar di Makassar, maka para pelaut tersebut dapat melanjutkan perjalanan ke Maluku dengan menyusur ke selatan lalu berbelok ke-kiri melayari pesisir selatan hingga ke pulau Buton dan selanjutnya berlayar ke Maluku.

Sederhananya—gamabarannya—begini, setelah nahkoda mendapatkan izin dari syahbandar, maka juru mudi akan mengarahkan haluan kapalnya ke arah selatan dan menyusuri lepas pantai Galesong, lalu berbelok ke kiri dan menyusuri lepas pantai Jeneponto, Bantaeng, dan Bulukumba serta Selayar dan berlayar menuju Buton lalu akhirnya berlabuh di Maluku atau Papua, rute tersebut biasanya digunakan dalam mengirim berbagai komoditas, salah satunya beras.

Selain itu terdapat pula rute jarak pendek dalam pengirimman beras, seperti Makassar – Parepare dengan menyisir pesisir barat Sulawesi Selatan; selain itu terdapat jalur rintisan jarak dekat rute Palopo – Bone – Bira dengan menyisir pesisir timur Sulawesi dalam hal ini Teluk Bone. Kemudian jalur pelayaran dengan jarak yang jauh ialah Jalur Makassar – Baubau – Wakatobi (Kepulauan Tukang Besi) – Buru – Ambon – Banda; terdapat pula jalur pelayaran Makassar – Selayar – Kabaena – Baubau – Pasarwajo – Tamperan – Bala – Raha dan kembali ke Makassar (Malihu, 1998 : 21) (Demmalino, 2018 : 12-15) (Hamid, 2018) (Poelinggomang et al., 2004 : 301).

Pelayaran balik dari Maluku dan Papua ke arah barat umumnya menggunakan angin muson timurlaut, yang bertiup dari Mei hingga September, dalam pelayaran ini

umumnya kapal dan perahu membutuhkan pelabuhan singgah. Ihwal tersebut karena tiupan angin muson melemah di perairan Laut Flores dan Laut Jawa. Olehnya itu posisi Makassar teramat penting sebagai pelabuhan singgah bagi pedagang yang datang dari arah timur. Lebih lanjut, perahu yang hendak meneruskan pelayaran ke arah barat harus menunggu angin muson tenggara melemah dan angin muson timurlaut menguat pada bulan Agustus, keadaan ini juga disebabkan oleh arah arus laut yang biasanya mengikuti arah angin (Poelinggomang, 2016).

Hembusan angin muson ini selain membawa dampak positif, tidak dielakkan juga membawa hal yang negatif, terutama pada persoalan *lanun* atau perompak. Pada umumnya para *lanun* ini memanfaatkan hembusan angin timur laut untuk melaksanakan *operandinya*, beberapa *lanun* yang cukup terkenal pada masa tersebut berasal dari Tobelo, Mangindanai, Balangngingi, dan sebagainya. Bahkan masyarakat yang bermukim di pesisir Pantai Serawak menyebut angin timurlaut sebagai “lanun, the pirate wind” (Rafiuddin, 2011 : 65).

Angin muson utara dan muson tenggara juga memungkinkan terciptanya jalur pelayaran utara – selatan, yakni rute Amoy dan Kanton – Makassar – Kepulauan Timur Nusantara. Pedagang dari Tiongkok dan Spanyol yang bermukim di Pulau Luzon, Filipina, bertandang ke Makassar dengan memanfaatkan angin muson utara melalui pesisir barat Kalimantan dan Selat Makkassar. Sementara itu pedagang dan pelaut dari Sulawesi memanfaatkan angin muson tersebut untuk berlayar ke selatan dengan melintasi Laut Flores kemudian menuju Pulau Sumbawa, lalu menyusuri perairan Kepulauan Nusa Tenggara Timur (Sunda Ketjil), bahkan hingga mencapai pesisir utara Benua Australia (Macknight, 2017 : 27) (Poelinggomang, 2016 : 16)

Siklus muson di wilayah Sulawesi menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan, baik jalur perdagangan barat

(Eropa, Gujarat, India Selatan, Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, dan Pesisir Timur Kalimantan – Makassar, Maluku, serta Papua) maupun jalur pelayaran utara (Tiongkok, Filipina, Kalimantan pesisir timur-utara [batas Tawau dan Serawak] dan Jepang – Makassar, Nusa Tenggara, dan Australia). Jalur-jalur itulah yang dimanfaatkan para pelaut dan pedagang untuk menghantarkan komoditas beras (selain komoditas lainnya).

Penyelundupan Beras Di Sulawesi Selatan Kurun Tahun 1950-1956

Peristiwa tentang penyelundupan beras di Sulawesi Selatan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik Sulawesi Selatan pada masa tersebut. Di dasawarsa 1950-an hingga 1960-an, Sulawesi Selatan ditimpa satu gerakan yang bernama DI/TII pimpinan Kahar. Guna melancarkan gerakan tersebut maka perlu menyediakan logistik perang, salah satu jalan ialah aksi-aksi penyelundupan yang dilakukan oleh *Contact Post* (disingkat CP).

Contact Post bisa dikatakan satu badan yang bertugas untuk urusan niaga, mengatur perdagangan antara daerah-daerah penghasil bumi yang dikuasai DI/TII dan juga termasuk daerah yang dikuasai TNI, pada dasarnya akan sulit mengetahui siapa saja yang bertugas di *Contact Post* kala itu (Subair, 2018 : 84).

Mengenai *Contact Post*, dalam disertasi Anhar Gonggong disebutkan bahwa peranan badan tersebut ialah mengusahakan pembelian senjata melalui sistem barter, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Selain pada tugas dan fungsinya, Anhar Gonggong juga menyebutkan wilayah kerja *Contact Post*, yakni meliputi: CP-I, berpusat di Mamuju, CP-II yang berpusat di Bulukumba, dan CP-III yang berpusat di Lapuse Danau Towoti (Gonggong, 1990 : 408).

Sekadar catatan, terdapat perbedaan data yang dikemukakan Anhar Gonggong dengan apa yang ditulis oleh Bahar Mattalioe, perbedaan tersebut terletak pada wilayah tugas CP-III yang beroperasi di

sekitar Danau Towoti. Dalam tulisan Bahar Mattalioe disebutkan bahwa wilayah kerja CP-III terletak di daerah Sinjai dan Bulukumba di bawah komandan Ali AT. (Bahar Mattalio, 1994 : 164, 166 dalam Subair, 2018 : 87). Walaupun demikian, terlepas dari perbedaan data tersebut, peranan Contac Post dapat dikatakan istimewa, hal tersebut dikarenakan wilayah kerja dari Contac Post menguasai simpul-simpul perdagangan strategis di perairan Sulawesi Selatan : Selat Makassar, Selat Selayar, dan Teluk Bone.

Salah satu daerah target penyelundupan beras yang dilakukan oleh Contact Post ialah Kalimantan, terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Tawau Malaysia (Sakka, 2003 : 273). Selain daerah yang berbatasan langsung dengan Tawau Malaysia, daerah seperti; Kota Baru, Balikpapan, dan termasuk Banjarmasin juga dilaporkan sebagai daerah tujuan penyelundupan beras.

Sebagaimana yang dilaporkan Berita Harian Kopal MKS dan kawat dari Panglima Territorium VII Wirabuana, diceritakan bahwa pada tahun 1954 sebanyak 4.000 ton beras diselundupkan ke kota-kota tersebut (Kota Baru, Balikpapan, dan Banjarmasin). Lebih lanjut diberitakan bahwa beras yang diselundupkan berasal dari Sigeri, Barru, kemudian beras-beras tersebut dimuat dengan perahu-perahu bertonase kecil lalu dilayarkan (dibawa) ke Pulau Salemo dan pulau-pulau sekitarnya— yang selanjutnya diangkut ke Kalimantan dengan menggunakan perahu layar bertonase besar (Arsip Pemda Barru, No. Reg. 179).

Untuk menghindari atau meminimalisir aksi-aksi penyelundupan beras maka Panglima Territorium VII Wirabuana mengeluarkan kawat yang ditujukan kepada Koordinator Keamanan Pare pare, Kepala Kejaksaan Pare pare, Kepala Kepolosian Kabupaten Pare pare, dan para kepala Pemerintahan Negeri dalam daerah Parepare untuk mengambil tindakan pencegahan penyelundupan beras, dengan imbalan *Special Premi* bagi mereka yang

berhasil menangkap atau menggagalkan aksi penyelundupan beras (Arsip Pemda Barru, No. Reg. 179).

Selain di daerah Parepare indikasi praktek-praktek penyelundupan beras juga dikabarkan terjadi di daerah Selayar, kurun tahun 1953-1954 terjalin kontak surat-menyurat antara Kepala Daerah Swantara Bonthain Alimuddin Dg. Mattiro yang membawahi Kawedana Selayar, Bonthain, Jeneponto-Takalar, dengan Kepala Pemerintahan Negeri Kawedana di Selayar. Dalam surat tertanggal 27 Oktober 1953 nomor 166/DB/XV Perihal: *Penjeludupan beras keluar dari pulau Djampea*, dikabarkan terdapat suatu indikasi penyelundupan beras ke daerah Flores, hampir selama sebulan surat tersebut belum mendapat balasan, hal ini dilihat dari dikirimkannya kembali surat tertanggal 26 Nopember 1953 nomor. 166a/DB/XV Perihal: *Penjeludupan beras keluar dari pulau Djampea*, yang berisi permintaan suatu kabar atau informasi terhadap maksud surat tertanggal 27 Oktober 1953 nomor 166/DB/XV. Balasan kedua surat tersebut baru dikeluarkan tertanggal 18 Maret 1954 melalui surat yang ditandatangani Dj Jamaluddin selaku Kepala Pemerintahan Negeri Kawedana Selayar dengan nomor surat 22/DB/XV.

Balasan surat kepala Kawedana Selayar kepada kepala Swantara Bonthain, setidaknya berisi tiga informasi penting, *pertama* luas tanah persawahan di pulau Djampea yang ditaksir kurang lebih 900 Ha dengan hasil rata-rata penghasilan beras sebanyak 900 Ton, *kedua* menampik kabar mengenai adanya penyelundupan beras, *ketiga* melakukan penyelidikan, pencegahan dan tindakan yang dianggap perlu dalam mencegah aksi-aksi penyelundupan beras dikemudian hari. Balasan surat dari Kepala Negeri Kawedana Selayar memberikan gambaran bahwa informasi yang didapatkan kepala Swantara Bonthain mengenai praktek penyelundupan beras di pulau Djampea keliru. Walaupun demikian, Kepala Negeri Kawedana Selayar mengambil langkah pencegahan dengan

melakukan penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut mengenai adanya “indikasi” penyelundupan beras di pulau tersebut. Secara umum daerah-daerah penyelundupan DI/TII Sulawesi Selatan adalah Kalimantan, Gresik, Singapura, Surabaya bahkan ke Mindanau. Dengan barter beras mereka memperoleh jenis senjata tertentu dan alat-alat pertanian (Arsip Pemda Selayar, No. Reg. 1471) (Sakka, 2003 : 274).

Salah satu jalan untuk mengimbangi aksi-aksi penyelundupan beras yang dilakukan oleh Contac Post, maka Panglima Terriotrium VII Wirabuana membentuk satu badan yang bernama Opsir Pekerdja Istimewa “X” Territorium VII Wirabuana (disingkat OPL.X. TT-VII). Tujuan utama didirikan OPL.X. TT-VII adalah untuk meningkatkan produksi dan perdagangan hasil bumi di Sulawesi Selatan seperti kopra, beras, Jagung dan berbagai komoditi lainnya, walaupun demikian fokus utama dari lembaga ini ialah komoditi Kopra dan Beras (Arsip Muhammad Saleh Lahade, No. Reg. 325).

Selain pada peningkatan produksi beras lembaga ini juga mengatur jalannya ekspor-impor beras, baik melalui pelabuhan Makassar maupun Pare-Pare. Selain itu OPL.X. TT-VII Wirabuana juga mengatur distribusi dan perdagngan beras antar wilayah Sulawesi Selatan. Sebelum kegiatan ekspor-impor beras, para pengusaha terlebih dahulu harus meminta surat izin istimewa dari pihak OPL.X. TT-VII agar diberikan izin melakukan perniagaan beras (Arsip Muhammad Saleh Lahade, No. Reg. 273). Adapun tugas-tugas dari OPL.X. TT-VII ialah sebagai berikut:

1. O.P.I.X. ini diadakan untuk mengetahui dan menguasai ekonomi guna kepentingan Strategis Militer dikemudian hari
2. O.P.I.X. di dalam TT VII mendapat instruksi/perintah langsung dari panglima
3. O.P.I.X ini dibantu oleh suatu staf khusus
4. Segala soal-soal ekonomi seperti

perizinan dikeluarkan langsung melalui staf khusus OPL.X. TT-VII

5. Usaha-usaha staff khusus ini, jika mengalami kesulitan dapat dibantu oleh resimen dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Jawatan Sipil.
6. Tiap-tiap minggu OPL.X. TT-VII melaporkan segala laporan perkembangan perdagangan hasil bumi (termasuk didalamnya Beras) kepada Panglima TT.VII Wirabuana (Arsip Muhammad Saleh Lahade, No. Reg. 325).

Dilihat dari tugas-tugas OPL.X. TT-VII maka dapat dijelaskan sebagai berikut, pertama, menguasai ekonmi guna kepentingan strategis militer dikemudian hari, yang dimaksud dari penguasaam ekonomi disini adalah tata niaga hasil bumi dimana salah satunya komoditi beras, perihal strategis militer ialah berkaitan dengan pengadaan logistik perang dalam menghadapi pemberontakan DI/TII. kedua, OPL.X. TT-VII diberikan kuasa untuk mengeluarkan perizinan perdagangan komoditi beras, kuasa ini bertujuan mengawasi jalannya perdagangan beras mengingat banyaknya praktek-praktek penyelundupan beras terutama yang dilakukan oleh kalangan Militer dan DI/TII yang terindikasi “bermain mata” dengan memanfaatkan situasi chaos dan ketiga, setiap minggu OPL.X. TT-VII memberikan laporan perkembangan perdagangan beras kepada panglima TT.VII Wirabuana.

Tercatat, sejak bulan Maret hingga Oktober 1955, OPL.X. TT-VII Wirabuana dibawa komando Mayor Saleh Lahade telah mengeluarkan izin ekspor-impor beras yang dikirim ke luar wilayah Sulawesi Selatan (Kalimantan, Ambon, Manado) baik melalui Pelabuhan Parepare maupun Pelabuhan Makassar. Tercatat 23.545 ton beras didistribusikan melalui kedua peabuhan tersebut. (Arsip Muhammad Saleh Lahade, No. Reg. 273). Perdagangan antar wilayah ini tentunya memberikan dampak pada perputaran uang di Sulawesi Selatan dan juga berpengaruh terhadap

harga komoditi beras, lebih jelasnya mengenai harga beras tersebut dapat disimak melalui tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6: Perkembangan Harga Beras Di Indonesia Tahun 1955-1956

Harga Beras 1955 (Dalam Rupiah/Kg)		Harga Beras 1956 (Dalam Rupiah/Kg)	
Januari	2.76	Januari	3.84
Februari	3.09	Februari	3.92
Maret	3.10	Maret	3.89
April	2.91	April	3.26
Mei	2.98	Mei	3.18
Juni	3.04	Juni	3.19
Juli	3.26	Juli	3.01
Agustus	3.53	Agustus	3.20
September	3.46	September	3.37
Oktober	3.42	Oktober	3.51
Nopember	3.74	Nopember	3.44
Desember	3.67	Desember	3.50
Rata-rata pertahun	3.41	Rata-rata pertahun	3.61

Sumber: Bulog, 1970 *Seperempat Abad Bergelut Dengan Butir-Butir Beras* Jakarta: Badan Urusan Logistik. Hlm : Lampiran I

PENUTUP

Dengan memerhatikan bentang alam Sulawesi Selatan dan potensi lahan produktif untuk ditanami padi, maka tidak dapat dinafikan bahwa daerah Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil beras, dengan luas areal persawahan di kurun tahun 1946-1950 yang mencapai angka 372.864 hektar telah mampu memproduksi beras lebih dari 71.000 ton. Selain itu, dengan kehadiran pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sulawesi Selatan, yakni Makassar dan Parepare, serta di pesisir timur Sulawesi Selatan yakni, Pallime dan Bajoe telah memunculkan aktivitas perdagangan di mana salah satu komoditas dagangnya adalah beras. Selain itu, adanya pelabuhan tersebut juga telah menciptakan satu jaringan perdagangan dari Makassar ke wilayah timur – barat demikian pula sebaliknya. Walaupun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa pada satu masa kegiatan perdagangan beras di Sulawesi Selatan sempat terganggu dengan adanya gerakan DI/TII Sulawesi Selatan yang salah satu muaranya adalah tindakan-tindakan penyelundupan beras, salah satu upaya yang dilakukan saat itu untuk meredam aksi ini

ialah intervensi militer dalam dunia perdagangan melalui O.P.I. X. TT-VI Wirabuana. Jadi secara umum dapat dikonklusikan bahwa beras selain bernilai ekonomis, beras juga mampu menciptakan jejaring ekonomi, pun beras memiliki nilai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim. 1953. *Republik Indonesia : Propinsi Sulawesi*. Makassar : Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi.
- Ammarell, G., 2016. *Navigasi Bugis*. Makassar : Penerbit Innawa
- Ahmad, Taufik & Syahril Killa. 2015. *Awal Kebangkitan dan Keruntuhan Pelabuhan Pallime di Bone*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Asba, Rasyid. 2007. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah : Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

BULOG. 1970. *Seperempat Abad Bergulat Denga Butir-Butir Beras*. Jakarta: Badan Urusan Logistik.

Macknight, C. C., 1976. *Voyage to Marege': Macassan trepangers in northern Australia*. Diterjemahkan oleh Anwar Jimpe Rahman, Ihsan Natsir., dan Abd. Rahman Abu (Ed). 2018. *The Voyage to Marege : Pencari Teripang dari Makassar di Australia*. Makassar: Penribit Inninawa

Mears, Leon A. 1982. *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Poelinggomang, E.L., 2016. *Makassar Abad XIX Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.

-----, *et.,al.* 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1*. Cet. 1. ed. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan : Makassar.

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Jogjakarta: Ombak.

Arsip / Dokumen / Lembaran Negara :

Dinas Perpustakaan dan Arsip Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pribadi Muhammad Saleh Lahade 1937-1973. *No.,Reg.* 273. Berkas mengenai kegiatan perdagangan beras di daerah Territerium VII Indonesia Timur, antara lain: kegiatan Jajasan Beras dan Jajasan Urusan Bahan Makanan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pribadi Muhammad Saleh Lahade 1937-1973.*No.,Reg.* 325. Surat Keputusan Bersama Gubernur Sulawesi dan Panglima TT-VII Wirabuana mengenai pembentukan “Panitia Pembentuk Dana Keamanan

dan Pembangunan Propinsi Sulawesi” (Panitia DKP Prosul). Salinan. April-Mei 1955.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemda Barru. *No.,Reg.* 179. Surat-surat dari Pemerintah Swapraja Tanete yang berhubungan dengan masalah penyelundupan beras dari daerah Barru, antara lain ke Kalimantan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemda Selayar. Volume I 1823-1973. *No.,Reg.* 1471. Surat-surat KPN Selayar menyangkut masalah kopra, antara lain perdagangan gelap kopra, izin pengangkutan kopra, stock kopra eks yayasan kopra 1950-1958.

Makalah / Skripsi / Tesis / Disertasi / Jurnal

Ambo Sakka, Abdul Rasyid A. 2003. “Ekspansi dan Kontraksi Ekspor Kopra Makassar 1888-1958”. Disetrasi. Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Anwar, Muhammad Vibrant. 1996. “Terbentuknya Kota Pelabuhan Makassar Studi kasus Tonggak Awal Pembentukan Kota Makassar Pada Masa Kerajaan Gowa Tahun 1510-1653”. Skripsi. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Evita, A. Lili. 2018. *Sianre Bale : Pasang Surut Ekonomi Maritim di Indonesia Timur 1946-1950 dalam Prosiding Seminar Nasional IKAJIS 1 edisi 10 Februari 2018-Memorial Lecture Dr. Edward L. Poelinggomang*. Makassar : Universitas Hasanuddin.

Demmalino, Eymal Basyhaar. 2018. *Pa'lopan : Kepanritaan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Anugerah dan Kiprahnya dalam Percaturan Ekonomi Nasional dalam Prosiding Seminar Nasional IKAJIS 1 edisi 10 Februari 2018-Memorial Lecture Dr.*

- Edward L. Poelinggomang. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Rahman, Hamid Abd. 2018. *Jaringan Pelayaran Mandar Akhir 1940-an : Antara Monopoli dan Perdagangan Bebas dalam Prosiding Seminar Nasional IKAJIS 1 edisi 10 Februari 2018-Memorial Lecture Dr. Edward L. Poelinggomang.* Makassar : Universitas Hasanuddin.
- , 2018. *Pelayaran Lintas Selat Makassar : Perkembangan Jaringan Maritim Mandar dalam Era Revolusi dalam Jurnal Abad Jurnal Sejarah Volume 02 Nomor 1 Edisi Juni 2018.* Jakarta : Abad Jurnal Sejarah
- Malihu, L., 1998. "Buton dan Tradisi Maritim : Kajian Sejarah tentang Pelayaran Tradisional di Buton Timur (1957-1995)". Tesis. Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia
- Maryam, Siti. 1999. "Perdagangan Beras Di Sulawesi Selatan Tahun 1930-1940". Skripsi. Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Najamuddin. 2000. "Sulawesi Selatan: Pergumulan Antara Negara Federal Dan Negara Kesatuan 1946-1949". Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Nur, Nahdia. 2003. "Produksi dan Pemasaran Beras di Sulawesi Selatan 1900-1943". Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana UGM.
- , 2017. "Jejaring Perdagangan dan Integrasi Ekonomi : Sejarah Ekonomi Sulawesi Bagian Selatan 1902-1930-an". Disertasi : Program Pascasarjana UGM.
- Nur, Nahdia, Bambang Purwanto, dan Djoko Suryo, *Perdagangan dan Ekonomi di Sulawesi Selatan pada Tahun 1900-an sampai dengan 1930-an.* Jurnal Ilmu Budaya Vol. 4. No. 1. Edisi Juni, 2016
- Poelinggomang, Edward L. 2011. *Padewakang dan Pinisi: Kajian Kemaritiman Sulawesi Selatan*, dalam Jurnal IKAHIMSI Edisi I, No.2, Juli-Desember Palu: Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Se Indonesia bekerja sama dengan Penerbit Ombak.
- Rafiuddin, Muhammad. 2011. "Perdagangan Budak di Makassar pada Abad XVII". Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Saransi, Ahmad & Nahdia Nur. 2018. *Sulawesi dalam Jaringan Dunia Maritim Abad 17-20. Prosiding Seminar Nasional IKAJIS 1 edisi 10 Februari 2018-Memorial Lecture Dr. Edward L. Poelinggomang.* Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Subair, Ahmad. 2018. "Jaringan Perdagangan Senjata pada Masa Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan Tahun 1950-1965". Tesis. Makassar : Program Pascasarjana UNM.
- Umar, Yuliani. 1990. "Bandar Somba Opu Sebagai Sumber Penghasilan Kerajaan Gowa Sampai Tahun 1667". Skripsi. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.